

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Signifikansi Penelitian	14
1.5 Keaslian Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Kebaruan Penelitian.....	16
1.6 Sistematika Penulisan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	36
2.1 Landasan Teori	36
2.1.1 Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman.....	36
2.1.2 Teori Tujuan Hukum Gustave Radbruch.....	38
2.1.3 Teori Kepatuhan Hukum	43
2.2 Landasan Konseptual.....	46
2.2.1 Perpajakan dan Beberapa Prinsip Perpajakan	46
2.2.2 Sanksi Administrasi Perpajakan.....	48

2.2.3	Sistem <i>Assessment</i> dalam Administrasi Pajak	50
2.2.4	Kepatuhan WP	51
BAB III METODE PENELITIAN.....		55
3.1	Bentuk dan Pendekatan Penelitian.....	55
3.2	Jenis Data dan Bahan Penelitian	58
3.3	Teknik Pengumpulan Data	62
3.4	Pengolahan dan Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN		67
4.1	Kebijakan Pengaturan Sanksi Administrasi Pajak di Indonesia	67
4.1.1	Pengaturan Sebelum 1984 dan Setelah 1984	67
4.1.2	Dinamika dan Substansi Pengaturan Sanksi Administrasi Perpajakan di Indonesia	77
4.1.2.1	Bentuk Sanksi Administrasi Perpajakan di Indonesia	77
4.1.2.2	Pelanggaran dan Besaran Sanksi Administrasi Perpajakan	82
4.1.3	Pengaturan Sanksi Administratif di Beberapa Negara Sahabat	99
4.1.3.1	Pengaturan Sanksi Administrasi Pajak di China.....	99
4.1.3.2	Pengaturan Sanksi Administrasi Pajak di Malaysia.....	108
4.1.3.3	Pengaturan Sanksi Administrasi Pajak Singapura	117
4.1.3.4	Pengaturan Sanksi Administrasi Pajak di Philipina.....	124
4.1.3.5	Pengaturan Sanksi Administrasi Pajak di Australia.....	129
4.1.3.6	Pengaturan Sanksi Administrasi Pajak Belanda	141
4.1.3.7	Pengaturan Sanksi Administrasi Pajak di Amerika	146
4.1.4	Temuan Penelitian dan Analisis.....	153
4.2	Implementasi Sanksi Administratif Pajak di Indonesia	166

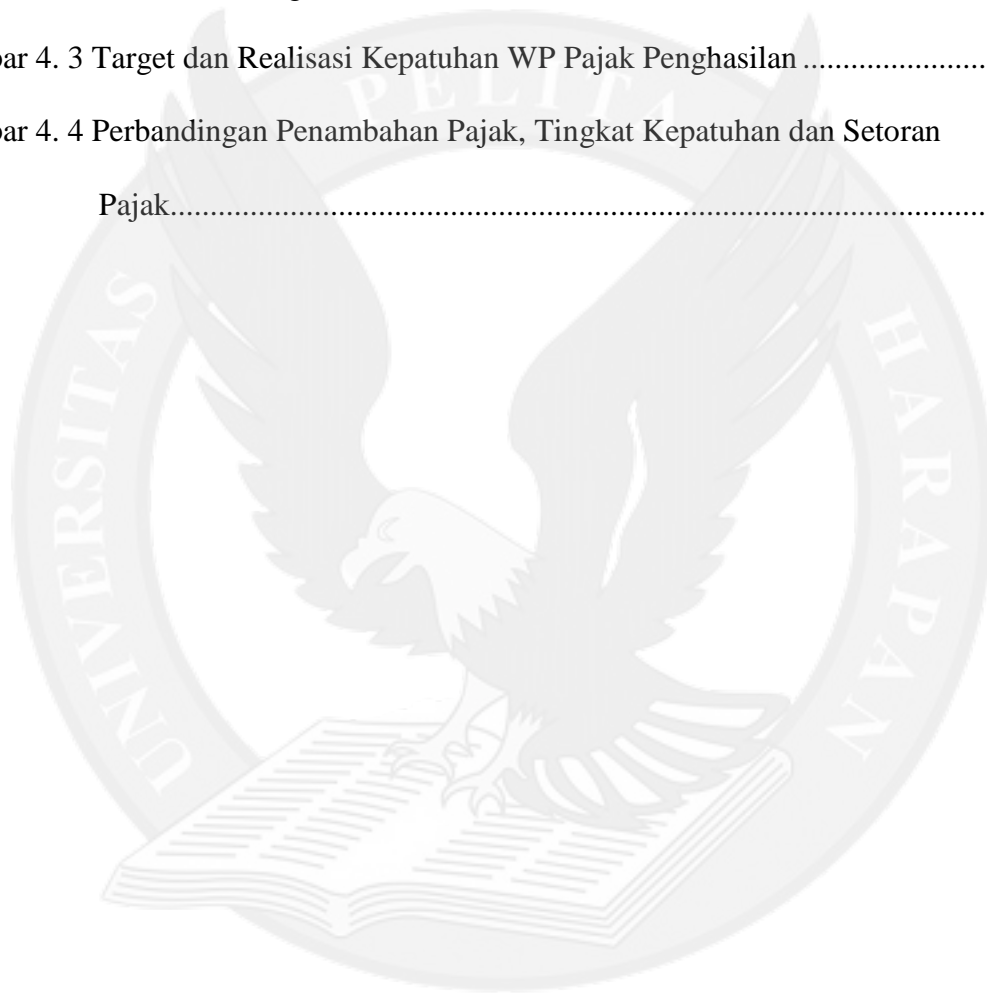
4.2.1	Evaluasi Implementasi Sanksi Administrasi Perpajakan di Indonesia.....	166
4.2.1.1	Evaluasi Aspek Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>)	166
4.2.1.2	Evaluasi Aspek Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	175
4.2.1.3	Evaluasi Aspek Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	178
4.2.2.	Kajian Beberapa Kasus Kasus	181
4.2.2.1	Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-32050/PP/M.III/99/2011	181
4.2.2.2	Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.37291/PP/M.V/99/2012	192
4.2.2.3	Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-30937/PP/M.VI/99/2011.....	203
4.2.2.4	Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-60477/PP/M.VIIIB/16/2015	209
4.2.3	Temuan Penelitian dan Analisis	228
4.3	Pengaturan Sanksi Administrasi Pajak di Indonesia yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan, dan Berkemanfaatan	245
4.3.1	Reformasi Regulasi dalam Ketentuan Sanksi Administrasi Pajak	245
4.3.2	Konsepsi Penguatan Sistem Pelaksanaan Sanksi Administratif Pajak.....	257
4.3.2.1	Penguatan Struktur Kelembagaan	257
4.3.3.2	Penguatan Sistem dan Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Sanksi	260
BAB V SIMPULAN		265
5.1	Kesimpulan	265
4.2	Saran	268
DAFTAR PUSTAKA		269
LAMPIRAN		276

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rata-Rata Tingkat Kepatuhan Formal (2012-2022).....	6
Tabel 1. 2 Penerimaan Pajak Indonesia dari Tahun 2016-2021	10
Tabel 1. 3 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4. 1 Pelanggaran dan Sanksi Pajak di China.....	104
Tabel 4. 2 Pelanggaran dan Sanksi Pajak di Malaysia	115
Tabel 4. 3 Pelanggaran dan Sanksi Pajak di Singapura.....	123
Tabel 4. 4 Pelanggaran dan Sanksi Pajak di Philipina	127
Tabel 4. 5 Pelanggaran dan Sanksi Pajak di Australia	139
Tabel 4. 6 Pelanggaran dan Sanksi Pajak di Belanda.....	145
Tabel 4. 7 Pelanggaran dan Sanksi Pajak di Amerika.....	151
Tabel 4. 8 Perbandingan Sanksi Denda UU KUP, UU Cipta Kerja dan UU HPP.....	155
Tabel 4. 9 Perbandingan Sanksi Bunga UU KUP, UU Cipta Kerja,,dan UU HPP.....	158
Tabel 4. 10 Perbandingan Sanksi Kenaikan UU KUP, UU Cipta Kerja, dan UU HPP	160
Tabel 4. 11 Sanksi Pemeriksaan Wajib Pajak Tidak Melaporkan SPT atau Membuat Pembukuan.....	229
Tabel 4. 12 Sanksi Setelah Upaya Hukum dengan Keputusan menguatkan Ketetapan Direktorat Jenderal Pajak	230
Tabel 4. 13 Besaran Sanksi untuk Kerugian Negara	230

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Tax Ratio.....	8
Gambar 1. 2 Perkembangan Penerimaan Perpajakan.....	8
Gambar 4. 1 Pebandingan Tax Ratio negara Amerika Latin, Afrika, dan Indonesia ...	238
Gambar 4. 2 Penerimaan Negara.....	242
Gambar 4. 3 Target dan Realisasi Kepatuhan WP Pajak Penghasilan	242
Gambar 4. 4 Perbandingan Penambahan Pajak, Tingkat Kepatuhan dan Setoran Pajak.....	244



DAFTAR SINGKATAN



APBN	: Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
CITA	: Center for Indonesia Taxation Analysis
CPO	: Crude Palm Oil
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DPP	: Dasar Pengenaan Pajak
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OECD	: The Organization for Economic Co-operation and Development
PDB	: Produk Domestik Bruto
PEB	: Pemberitahuan Ekspor Barang
Perpu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PK	: Pajak Keluaran
PKP	: Pengusaha Kena Pajak
PM	: Pajak Masukan
PNBP	: penerimaan negara bukan pajak
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKP	: Surat Ketetapan Pajak
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPKBT	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
SPT	: Surat Pemberitahuan
SSP	: Surat Setoran Pajak
STP	: Surat Tagihan Pajak

UU Cipta Kerja: Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

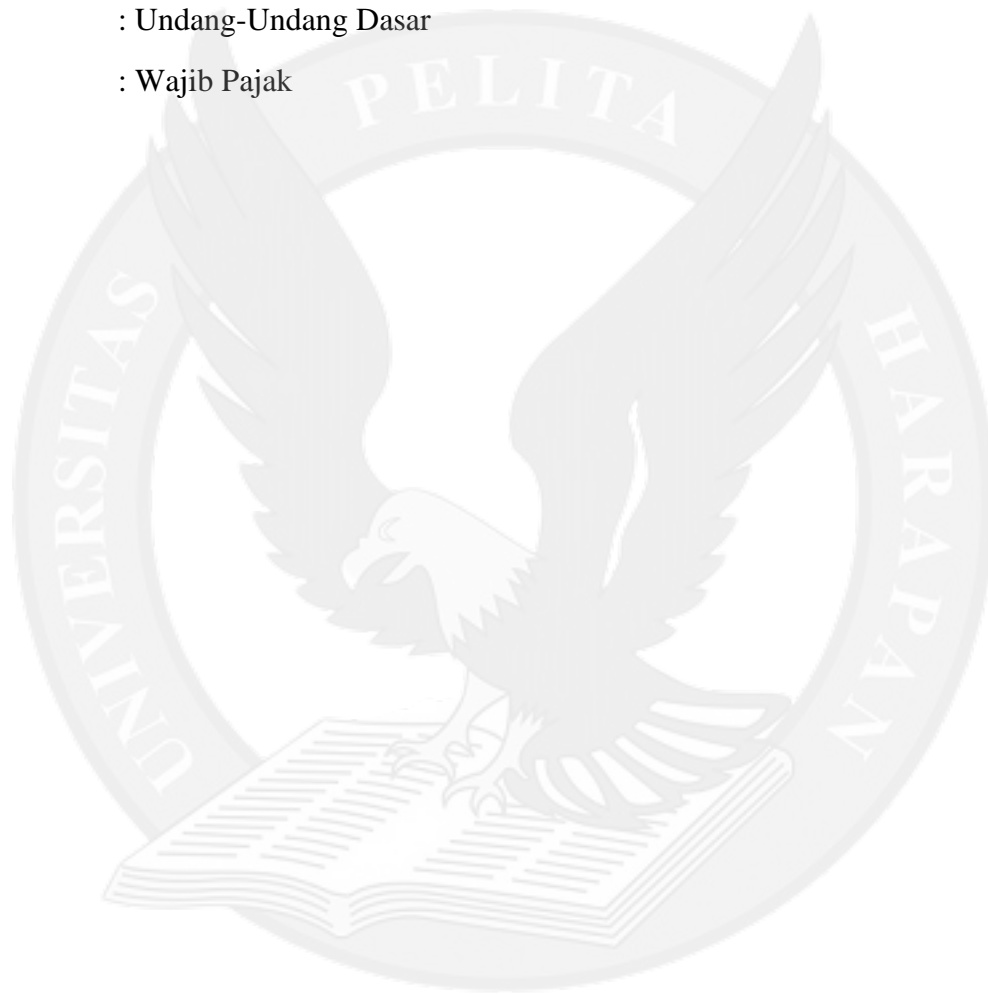
UU HPP : Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

UU KUP : Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yaitu UU Nomor
6 Tahun 1983 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor
16 tahun 2009.

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar

WP : Wajib Pajak



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perubahan Pasal-Pasal pada Ketentuan Tata Cara Perpajakan Berdasarkan UU KUP, UU Cipta Kerja, dan UU HPP	276
Lampiran 2 Sumber Penerimaan Keuangan Tahun 2020, 2021, dan 2022	288
Lampiran 3 Sumber Penerimaan Negara pada tahun 2017, 2018, 2019.	289

